

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang berazaskan Pancasila dan kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila keempat. Rakyat mewakilkan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini terdapat pemisahan wewenang diantara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan antar penyelenggara negara.²

Otonomi daerah berlangsung di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu konsekuensi dikeluarkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah adalah timbulnya perbedaan antara daerah, salah satunya dalam hal kemampuan keuangan daerah. Maka keuangan daerah menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengelola rumah tangga daerah.³

Setiap pemerintah daerah, wajib menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya laporan

² Halkadri Fitra, *“Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerinta Daerah”*, (Malang: CV. IRDH, 2019), hlm. 1

³ Moh. Khusaini, *“Keuangan Daerah”*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 1

keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD).⁴

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan pemerintah memberikan informasi mengenai kinerja badan publik diantaranya yaitu mengenai laporan keuangan yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Sebagai bentuk salah satu akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat melalui DPRD setelah terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik.⁵

Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk merupakan lembaga Pemerintahan Daerah terletak di jantung Kota Nganjuk yang letaknya sangat strategis dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk mempunyai beberapa bidang diantaranya

⁴ Moermahadi S. Djanegara, "*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*", (Bogor: Kesatuan Press, 2017), hlm. 1

⁵ Dito Aditia Darma Nasution, dkk., "*Bimbingan Teknis Peningkatan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Tanjung Balai (Kecamatan Datuk Bandar)*", (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm. 1-2

ada bidang sekretariat, bidang angkutan dan transportasi, bidang lalu lintas, dan bidang teknik sarana dan prasarana.

Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021 dalam program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten mempunyai target anggaran 22.209.743.050,00 dengan realisasi 20.584.799.974,00 yang artinya penyerapan anggaran mencapai 92,68%. Dimana mengalami penurunan dari tahun 2020 yaitu penyerapan anggaran mampu mencapai 94,29% dan menjadikan Dinas Perhubungan kabupaten Nganjuk menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan serapan tertinggi ke 2 setelah RSUD Nganjuk.⁶

Akan tetapi, di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk masih keterbatasan sumber daya manusia terutama pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta minimnya kemampuan pengetahuan terkait komputer. Padahal dalam mengakses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah diperlukan kemahiran dalam mengoperasikan komputer.

Selain itu juga belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan Database, sehingga implementasi *elektronik government* belum sepenuhnya di dukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat, dan akurat. Jumlah sumber daya manusia yang tertuang dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah

⁶ Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, "*Laporan Keuangan Tahun 2021*", <https://dishub.nganjukkab.go.id/berita/semua-berita/256/LAPORAN-KEUANGAN-TAHUN-2021>, diakses pada tanggal 14 November 2022 pukul 10.36

(SKPD) mulai dari jumlah jabatan struktural 18 orang, pegawai tetap (PNS) 74 orang dan tenaga kontrak sebanyak 141 orang.⁷

Di dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan sumber daya manusia yang sangat strategis, karena merupakan gabungan dari semua potensi yang dimiliki oleh pegawai baik fisik maupun non fisik, dengan adanya kemampuan tersebut mampu menggerakkan, mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kondisi sumber daya manusianya.

Jika potensi sumber daya manusia baik, maka organisasi akan berjalan dengan baik demikian sebaliknya jika potensi sumber daya manusianya buruk, maka sudah dapat dipastikan organisasi akan mengalami hambatan untuk mencapai tujuan.⁸ Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia (SDM) maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puji Hastuti⁹ kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Pegi Aprisyah dan Anik Yuliati¹⁰ kompetensi sumber daya manusia tidak mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

⁷ Dinas Perhubungan, "LkjIP Dinas Perhubungan Tahun 2020", https://www.nganjukkab.go.id/home/upload_file/sakip/423b8d4fb07274f312d611aa29010649.pdf diakses tanggal 14 November 2022 pukul 08.12

⁸ Sri Hartati, "Gender Dalam Birokrasi Pemerintahan", (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 39

⁹ Puji Hastuti dan Akhmad Riduwan, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Akuntansi Aktual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah", Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 2018, Vol. 7(7), hlm. 1-20

¹⁰ Pegi Aprisyah dan Anik Yuliati, "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu)", Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)", Vol. 5(2), 2021, hlm. 1855-1869

Pembuatan laporan keuangan yang cepat di perlukan adanya sistem agar lebih mudah dalam melakukan mengimputan data. Maka dari itu Kemendagri memunculkan aplikasi yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi yang terdiri dari pembangunan dan keuangan yang di kelola dalam sistem informasi pemerintah daerah.¹¹ Berdasarkan penelitian yang dilakukan Devia Yulianda, Nasrul Kahfi Lubis, dan Iqlima Azhar¹² Sistem Informasi Pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Langsa.

Sedangkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu adanya pengendalian manajemen yang efektif untuk menyatakan visi, misi, sasaran-sasaran kinerja strategis dan tahunan untuk mengukur serta melaporkan kinerja dari pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Selain itu untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh untuk peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.¹³ Berdasarkan

¹¹ Banu Witono, *"Hegemoni Regulatif Dan Diskursus Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah"*, (Malang: Peneleh, 2022), hlm. 170

¹² Devia Yulianda, Nasrul Kahfi Lubis, dan Iqlima Azhar, *"Pengaruh Kompeten Pengguna, Teknologi Informasi dan Implementasi SIPD Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lota Langsa"*, Jurnal ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA), Vol. 3 (2), 2022, hlm. 794-804

¹³ Rahmadi Murwanto, dkk., *"Audit Sektor Publik di dalam"* https://www.google.co.id/books/edition/Audit_Sektor_Publik/bN23DQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengendalian+manajemen+pemerintahan&pg=PA289&printsec=frontcover di akses tanggal 07/11/2022 pukul 09:16

penelitian yang dilakukan Daniel T.H. Manurung¹⁴ sistem pengendalian manajemen berpengaruh terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Jadi, untuk pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, diperlukan analisis kompetensi sumber daya manusia, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan pengendalian manajemen guna mengembangkan penyerapan anggaran secara optimal dan sumber daya manusia ke arah yang lebih baik lagi.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda, dimana ada yang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Oleh karena itu penelitian ini mengacu pada variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yang masih ada perselisihan dengan yang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi keaslian dan perbedaan adalah dimana variabel-variabel penggabungan dari penelitian sebelumnya dan ditambah variabel penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Selain, perbedaan dari variabel-variabel yang digunakan, perbedaan lainnya yaitu populasi dan sampel. Pada penelitian terdahulu, sampel yang digunakan mencakup responden seluruh pegawai kantor, akan tetapi pada penelitian ini hanya berfokus pada pegawai Dinas Perhubungan yang mengelola laporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk

Adapun untuk variabel independen dalam penelitian ini ialah kompetensi sumber daya manusia, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,

¹⁴ Daniel T.H. Manurung, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah Kota Palangkaraya", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 2(1), 2012, hlm. 1-30

dan pengendalian manajemen. Sedangkan variabel dependennya yaitu kualitas laporan keuangan. Untuk objek sampelnya adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan pengendalian manajemen terhadap kualitas laporan keuangan tersebut sangat penting untuk diteliti. Hal tersebut menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Pengendalian Manajemen Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya:

1. Pengelolaan sumber daya publik Dinas Perhubungan Kabupaten nganjuk yang saat ini telah memanfaatkan kompetensi sumber daya manusia.
2. Pergantian tata pembukuan instansi pemerintah daerah khususnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk yang sebelumnya dengan sistem pembukuan menjadi sistem akuntansi.
3. Pengendalian manajemen Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan memanfaatkan sistem informasi.

4. Ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk?
3. Bagaimana pengendalian manajemen berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk?
4. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan pengendalian manajemen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk.

2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian manajemen berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk.
4. Untuk menganalisis secara simultan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan pengendalian manajemen terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis diharap mampu memberi sumbangan pada pengembang teori, khasanah pengetahuan kompetensi sumber daya manusia, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan pengendalian manajemen terhadap kualitas laporan keuangan sehingga bisa meningkatkan ilmu pengetahuan dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi.

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk Institusi

Diharap hasil penelitian bisa menjadi tambahan referensi juga menambah pemahaman tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan pengendalian manajemen terhadap kualitas laporan keuangan sehingga bisa menjadi bahan pengevaluasian dan pertimbangan untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui kompetensi sumber daya manusia, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan pengendalian manajemen Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk.

b. Untuk Akademisi

Diharap penelitian ini bisa menambah pemahaman, pengetahuan, wawasan tentang Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terutama dalam bidang Sistem Informasi Akuntansi yang berhubungan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar bisa dipakai sebagai pengembangan keilmuan khususnya dibidang Mata Kuliah Sistem Informasi Akuntansi serta untuk penelitian selanjutnya.

c. Untuk pihak lainnya

Diharap hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengkaji tentang penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian internal. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia (x_1), penerapan SIPD (x_2), pengendalian manajemen (x_3). Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan Dinas Kabupaten Nganjuk.

2. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini tidak ada keterbatasan dalam penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bidang sekretariat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk sebanyak 25 karyawan.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam lingkungan pekerjaannya.¹⁵ Kompetensi sumber daya manusia berkaitan

¹⁵ Im. Anugerah, "BAB II", dalam <http://repository.unpas.ac.id/14484/5/BAB%20II.pdf>, diakses 22 Oktober 2022

dengan keyakinan dan nilai-nilai, keterampilan, pengalaman, karakteristik kepribadian dan kemampuan intelektual.¹⁶

- b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah.¹⁷ Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah sistem yang berkaitan dengan pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.¹⁸
- c. Pengendalian manajemen merupakan proses sistematis dan digunakan untuk memastikan bahwa manajemen mampu untuk mengola dan mengoordinasi sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu *goal congruence*.¹⁹ Pengendalian Manajemen berkaitan dengan hasil perencanaan strategis, penganggaran, implementasi dan pengukuran serta evaluasi kerja.²⁰
- d. Kualitas laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan

¹⁶ Ivalaina Astarina dan Sry Windartini, “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”, (Samarinda: STMIK Widya Cipta Dharma, 2022), hlm. 428

¹⁷ Muhammad Irfan Nasution dan Nurwani, “*Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan*”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 9 (2), (Aceh Utara: Universitas Malikussaleh, 2021), hlm. 109

¹⁸ Chinda Aqhni Adisi dan Abdul Sadad, “*Efektivitas Program Sistem Informasikan Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu*”, Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial Vol. 1, No. 3, (Purwokerto: Politeknik Pratama, 2022), hlm. 154

¹⁹ Wirawan ED Radianto, “*Konsep Dasar Pengendalian Manajemen*”, (Surabaya: Universitas Ciputra), hlm. 14

²⁰ Jaluanto Sunu Punjul Tyoso, “*Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Sistem Pengendalian Manajemen Pada Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah di Jawa Tengah*”, (Semarang: Butterfly Mamoli Press, 2021), hlm. 5

keuangan yang berkualitas.²¹ Kualitas laporan keuangan berkaitan dengan relevan, andal, dapat dibanding, dapat dipahami.²²

2. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dakam penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengkaji apakah dengan adanya kompetensi sumber daya manusia, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan pengendalian manajemen berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan membahas mengenai persoalan penelitian sehingga melatar belakangi adanya penelitian ini, selain itu ada identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini mengulas mengenai teori yang membahas variabel yakni kompetensi sumber daya manusia, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan pengendalian Manajemen, dijelaskan pula terkait kajian

²¹ Sri Dewi Anggadini, "Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Dampak Dari Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah", Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 12(2), 2021, hlm. 166

²² Syahril Effendi, "Akuntansi Keuangan SKPD/SKPKD (PPKD) Pemerintahan Daerah", (Batam: Cv. Batam Publisher, 2021), hlm. 12-13

penelitian sebelumnya untuk pembading, hipotesis penelitian maupun kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini mengulas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini mengulas mengenai hasil penelitian yang berbentuk deskripsi data dan pengujian hipotesis dari penelitian yang telah di paparkan dari rumusan masalah.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi pembahasan tentang keterkaitan analisis data yang telah didapatkan dari penelitian.

BAB VI PENUTUP

Pada bagian ini berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran dari penulis yang ditujukan kepada siapa, serta harus sesuai temuan studi penelitian.

Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.